

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis bagaimana faksionalisasi yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan memiliki implikasi terhadap hasil Pilpres 2024 dan menjadi faktor penyebab kegagalan kandidat presiden yang diusung PDI Perjuangan. Dalam menganalisisnya, peneliti menggunakan kerangka pemikiran Francoise Boucek mengenai faksionalisasi. Kerangka pemikiran yang digunakan meliputi konflik internal PDI Perjuangan, penyebab kekalahan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, dan bagaimana faksionalisasi yang tidak dikelola dengan baik oleh kepemimpinan Partai PDI Perjuangan tersebut berimplikasi pada kegagalan pasangan Ganjar-Mahfud dalam memenangkan Pilpres 2024.

Pada dasarnya, kandidat Ganjar-Mahfud yang diusung oleh PDI Perjuangan memiliki keuntungan dalam aspek modal politik seperti diusung oleh partai pemenang Pemilu 2019 dan salah satu partai terbesar di Indonesia. Selain itu, saat itu Jokowi yang merupakan Presiden Indonesia dengan memiliki massa pendukung yang besar dan memenangkan Pilpres sebanyak dua kali juga menjadi kader dari PDI Perjuangan. Ganjar-Mahfud juga menjadi calon presiden dengan dana kampanye terbesar diantara 2 kandidat lainnya, tercatat pengeluaran dana kampanye Ganjar sebesar Rp 506,892 miliar. Sedangkan Prabowo-Gibran sebesar Rp 207,576 miliar dan Anies-Muhaimin sebesar Rp 49,34 miliar ([cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), 2024).

Namun itu semua nyatanya tidak linear dengan apa yang menjadi hasil sesungguhnya dari rekapitulasi suara Pilpres 2024. Hasil akhir penghitungan suara oleh KPU RI menetapkan bahwa pasangan Prabowo-

Gibran merupakan pasangan pemenang yang berhasil memperoleh suara sah sebesar 58,58%. Perolehan suara tersebut merupakan hasil dari Prabowo-Gibran berhasil memenangkan suara di 36 Provinsi dan Dapil Luar Negeri. Sedangkan Anies-Muhaimin berhasil memperoleh 24,95% suara sah dan berhasil menang di 2 dapil. Sedangkan, Ganjar-Mahfud hanya memperoleh 16,47% suara dan mengalami kekalahan secara masif di seluruh dapil.

Melihat hal ini, banyak dugaan yang datang dari beragam tokoh, baik berasal internal maupun eksternal PDI Perjuangan. Dugaan-dugaan tersebut memiliki benang merah, yakni seluruh tokoh yang memberikan pendapat mengenai kekalahan PDI Perjuangan di Pilpres 2024 setelah berhasil melanggengkan kekuasaannya selama dua periode menyatakan bahwa kisruh internal partai saat Pilpres 2024 lah yang menjadi faktor yang akhirnya berimplikasi pada kekalahan kandidat pasangan Ganjar-Mahfud. Selama ini, kekalahan atau kemenangan seorang pasangan Pilpres itu diletakkan dengan figur dan ketokohan pasangan yang dicalonkan, seberapa besar modal dan pendanaan yang digelontorkan untuk kampanye, kekuatan jejaring yang dimiliki setiap pasangan calon, dan sebagainya. Akan tetapi, pada kasus ini peneliti mendapati *outlier* dari asumsi populer tersebut, bahwa faksionalisasi internal partai juga dapat menjadi faktor kekalahan suatu kandidat dalam pemilu.

Konflik antara Jokowi dan PDI Perjuangan memuncak pada Oktober 2023, saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Putusan MK ini dianggap kontroversial karena Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, ipar Jokowi, yang kemudian diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran etik berat. Langkah ini dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk intervensi kekuasaan demi kepentingan keluarga

Jokowi dan sangat bertentangan dengan prinsip netralitas lembaga yudikatif (Mantalean, 2023).

PDI-P semakin menjauh setelah Gibran resmi maju bersama Prabowo melalui Koalisi Indonesia Maju yang tidak melibatkan PDI-P. Megawati dan para elit PDI-P menilai Jokowi telah meninggalkan partai dan bahkan secara diam-diam mendukung paslon lain. Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan Sekjen Hasto Kristiyanto, dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Jokowi tidak lagi berada dalam garis partai, bahkan menyebutnya “bukan petugas partai” dalam makna yang mereka harapkan. Kritik ini diperkuat oleh pidato Megawati pada HUT PDI-P ke-51, yang secara tersirat mengecam penggunaan kekuasaan untuk kepentingan elektoral keluarga (Gabriela, 2024).

Tindakan Presiden Jokowi yang secara aktif membagikan bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara juga memperdalam jurang perbedaan. Meskipun bansos adalah program pemerintah, intensitas dan personalisasi distribusinya pada awal 2024 dinilai sebagai kampanye terselubung bagi pasangan Prabowo-Gibran. Beberapa laporan menyebutkan bahwa bansos diberikan tanpa label institusi resmi dan justru menonjolkan citra presiden (Aranditio, 2024). Setelah pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan menang satu putaran oleh KPU, relasi Jokowi dan PDI-P memasuki fase konfrontatif. Banyak pihak menilai Jokowi akan membentuk poros kekuasaan baru di luar PDI-P, bahkan digadang-gadang akan mendukung regenerasi dinasti politik. Sebaliknya, PDI-P secara terbuka menyatakan akan mengambil peran oposisi terhadap pemerintahan baru. Konflik ini menggambarkan faksionalisasi politik antara kekuatan berbasis partai dan kekuatan berbasis keluarga, yang dapat berdampak jangka panjang pada arah demokrasi di Indonesia.

Faksionalisasi antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan menjelang Pemilu 2024 menjadi salah satu faktor strategis yang secara signifikan memengaruhi konstelasi politik nasional, terutama dalam konteks kekalahan calon presiden Ganjar Pranowo. Ketegangan tersebut bukan sekadar perselisihan elite, melainkan perwujudan dari pergeseran kekuasaan dari model partai-sentris (*party-centered politics*) ke model figur-sentris (*leader-centered politics*), sebagaimana dikaji oleh Lili Romli dalam teori *personalistik dalam partai politik*. Dalam pandangannya, ketika partai tidak mampu mengendalikan atau mempertahankan loyalitas tokoh kunci, maka partai akan kehilangan posisi hegemoniknya di hadapan pemilih.

Konflik terbuka yang terjadi setelah Presiden Jokowi memilih untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran yang secara eksplisit tidak diusung oleh PDI Perjuangan menandai pecahnya konsolidasi internal kekuasaan. Alih-alih memperkuat barisan partai, Jokowi lebih memilih membangun kekuatan politik berbasis jaringan keluarga dan birokrasi negara, termasuk penggunaan bansos sebagai alat mobilisasi elektoral. Kondisi ini menyebabkan PDI-P kehilangan dukungan struktural dari negara dan berhadapan dengan kekuatan incumbency yang masif.

Ketidakhadiran Jokowi dalam barisan pendukung Ganjar membuat mesin partai kehilangan daya dukung elektoral di berbagai wilayah, terutama di kantong-kantong suara yang sebelumnya menjadi basis kemenangan Jokowi. Tanpa dukungan sumber daya negara, kekuatan logistik, dan pencitraan simbolik yang dimiliki Jokowi, Ganjar tidak mampu bersaing secara seimbang melawan paslon yang didukung oleh kekuasaan penuh. Dengan demikian, seperti yang dijelaskan Lili Romli, ketika loyalitas tokoh terhadap partai melemah, maka potensi keterbelahan (*fragmentasi*) politik internal akan mengakibatkan kegagalan dalam membangun koalisi elektoral yang efektif. Akhirnya, faksionalisasi ini tidak hanya menyebabkan kekalahan Ganjar, tetapi juga menjadi titik balik

bagi masa depan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa yang kini kehilangan figur utamanya di pemerintahan. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara elite partai dan aktor negara dalam menjaga soliditas politik dan memastikan keberlangsungan kekuasaan dalam sistem demokrasi elektoral.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori faksionalisasi, khususnya kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Françoise Boucek (2009), yang membagi faksi menjadi tiga tipe utama: *benevolent*, *competitive*, dan *degenerative factionalism*. Dalam konteks PDI Perjuangan pada Pilpres 2024, gejala yang muncul menunjukkan bahwa faksionalisasi telah bergerak dari bentuk kompetitif ke arah degeneratif, yang ditandai dengan fragmentasi elite, lemahnya mesin partai di tingkat daerah, dan berkurangnya koordinasi vertikal antarlembaga kampanye.

Oleh karena itu, secara akademis, hasil dari studi ini menunjukkan bahwa teori faksionalisasi sangat relevan dan aplikatif dalam menganalisis dinamika internal partai politik di Indonesia, khususnya dalam masa-masa krusial seperti pencalonan presiden. Namun demikian, penggunaan teori ini masih membutuhkan pengayaan, baik dari sisi desain metodologi maupun pengembangan instrumen analisis. Oleh karena itu, beberapa saran akademis berikut diajukan:

1. Pengembangan Teori Faksionalisasi dalam Konteks Kepartaian Indonesia

Faksionalisasi di Indonesia tidak hanya terjadi secara ideologis, tetapi juga secara struktural, kultural, dan berbasis patronase

kekuasaan. Penelitian mendatang dapat mencoba menggabungkan teori faksionalisasi dengan teori kelembagaan partai (party institutionalization) untuk memahami bagaimana kelemahan struktur internal partai justru membuka ruang bagi faksi-faksi informal atau eksternal yang tidak terkontrol.

2. Perluasan Objek Studi secara Komparatif Lintas Partai

Studi ini fokus pada PDIP sebagai kasus tunggal. Namun, untuk mengembangkan validitas teoritisnya, perlu dilakukan penelitian komparatif dengan partai-partai besar lainnya seperti Golkar, NasDem, atau PKB. Hal ini untuk melihat apakah kecenderungan faksionalisasi destruktif juga muncul di partai lain yang mengalami kontestasi internal elite.

3. Penelitian Lanjutan terhadap Faksi Eksternal Berbasis Kekuasaan Negara

Dalam Pilpres 2024, munculnya faksi eksternal berbasis kekuasaan (misalnya lingkaran istana dan relawan Jokowi) merupakan fenomena baru dalam politik elektoral Indonesia. Fenomena ini belum banyak dikaji secara akademis, dan membuka ruang untuk mengembangkan teori faksionalisasi dalam hubungan antara partai, negara, dan elite eksekutif. Studi ini mendorong agar peneliti mengembangkan konsep baru seperti “state-driven faction” atau “patronal electoral faction” yang muncul di luar struktur formal partai tetapi memiliki dampak elektoral langsung.

4. Pentingnya Penelitian Mikro di Tingkat Daerah

Karena sebagian besar konflik internal partai seringkali tidak muncul secara eksplisit di tingkat pusat, namun tercermin dalam disfungsi mesin partai di daerah, maka perlu dilakukan penelitian

lapangan mikro di DPD dan DPC. Studi ini mendorong pendekatan etnografi politik atau wawancara elite lokal untuk memetakan loyalitas kader, konflik tersembunyi, dan dinamika koordinasi kampanye.

5. Integrasi Teori Faksionalisasi dengan Teori Komunikasi Politik
Ketidaksinkronan komunikasi dalam kampanye Ganjar menunjukkan pentingnya menyinergikan teori faksionalisasi dengan teori komunikasi politik dan framing. Peneliti di bidang ilmu komunikasi politik disarankan mengembangkan model analisis berbasis faksi, untuk mengukur sejauh mana kohesi narasi kampanye dapat dijaga di tengah fragmentasi elite. Ini penting mengingat politik elektoral modern sangat dipengaruhi oleh narasi dan persepsi publik yang dibentuk melalui media sosial dan elite opinion leaders.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori faksionalisasi dalam konteks Indonesia, tetapi juga membuka ruang pengembangan teoretis dan metodologis untuk memperdalam studi partai politik dan kekuasaan. Kajian faksionalisasi harus terus diperluas untuk menjangkau dinamika internal partai yang kompleks dan peran kekuasaan negara yang sering kali menciptakan struktur politik paralel di luar organisasi formal partai.

5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat ditujukan secara khusus kepada PDI Perjuangan sebagai bentuk refleksi strategis dan kelembagaan terhadap dinamika faksionalisasi yang terjadi selama proses pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Fitrya Anugrah Kusumah

**ANALISIS KEGAGALAN PDI PERJUANGAN DALAM MEMENANGKAN GANJAR PRANOWO
SEBAGAI PRESIDEN DI PEMILIHAN UMUM 2024**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

1. Pertama, PDI Perjuangan perlu membangun mekanisme manajemen faksi yang terstruktur dan adaptif. Dalam konteks partai besar seperti PDIP, faksionalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, jika tidak dikelola secara bijaksana, faksi internal dapat berkembang menjadi destruktif dan memecah kohesi organisasi. Oleh karena itu, partai perlu menciptakan ruang kompromi yang formal bagi setiap kelompok atau faksi dalam internal partai untuk menyalurkan aspirasi, tanpa harus menimbulkan perpecahan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk forum konsultasi antar-faksi, pelibatan kolektif dalam pengambilan keputusan, serta sistem distribusi peran politik yang seimbang antara elite pusat dan daerah.
2. Kedua, PDI Perjuangan disarankan untuk merevisi mekanisme kandidasi dan pengambilan keputusan strategis yang selama ini bersifat sentralistik. Dominasi penuh Ketua Umum dalam menetapkan calon presiden sebagaimana diatur dalam AD/ART partai terbukti menciptakan eksklusivitas terhadap faksi atau kelompok kekuasaan lain di luar lingkaran ketua umum. Untuk mencegah konflik laten berulang, diperlukan desentralisasi keputusan strategis yang melibatkan struktur daerah seperti DPD dan DPC, serta jaringan relawan dan kelompok akar rumput, dalam proses penjangkaran dan pencalonan tokoh nasional.
3. Ketiga, PDI Perjuangan juga perlu merekonstruksi hubungan politik dengan Presiden Joko Widodo, yang meskipun berasal dari internal partai, telah membentuk poros kekuasaan tersendiri yang beroperasi di luar garis komando partai. Friksi antara faksi Jokowi dan faksi Megawati telah menciptakan ambiguitas kepemimpinan dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi transisi dan konsolidasi kekuasaan yang mampu menjembatani figur-figur penting partai, baik yang masih aktif dalam jabatan maupun yang

telah melepas jabatan publik, guna memastikan kesinambungan ideologis dan strategi partai dalam jangka panjang.

4. Keempat, PDIP disarankan untuk memperkuat mesin partai di tingkat daerah melalui pelatihan kader yang lebih responsif terhadap isu elektoral dan penggunaan teknologi kampanye modern. Melemahnya dukungan daerah terhadap Ganjar pada Pilpres 2024 mencerminkan tidak hanya ketidakpuasan struktural, tetapi juga lemahnya pelibatan kader dalam proses kampanye nasional. Partai harus melakukan audit internal, penguatan loyalitas struktural, dan evaluasi program kaderisasi agar mesin partai tetap solid dan aktif dalam kontestasi nasional.
5. Kelima, dari sisi komunikasi politik, PDI Perjuangan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang terintegrasi dan berbasis segmentasi pemilih, terutama pemilih muda dan digital. Kampanye yang terfragmentasi, tidak konsisten antara DPP, TPN, dan kandidat, menyebabkan narasi politik tidak tersampaikan secara efektif. Oleh karena itu, partai perlu membangun satu garis komunikasi yang menyatukan pesan politik antar-tingkatan partai, serta mengoptimalkan peran media sosial, influencer muda, dan komunitas digital yang berpengaruh
6. Terakhir, sistem etika dan disiplin partai juga perlu diperkuat namun dijalankan secara proporsional dan transparan. Pemecatan kader yang dianggap membelot memang perlu dilakukan demi menjaga marwah partai, tetapi proses tersebut harus disertai dengan mekanisme evaluatif dan reintegratif yang adil, agar tidak memperparah faksionalisasi dan alienasi politik di dalam tubuh partai. Melalui penerapan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan PDI Perjuangan dapat memetik pelajaran strategis dari kegagalannya dalam mengusung Ganjar Pranowo dan melakukan penataan ulang atas dinamika internal dan eksternal partai demi

menjaga keberlanjutan dan relevansinya dalam sistem demokrasi Indonesia yang semakin kompetitif.